

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

2023

**LAPORAN KINERJA**

**INSTANSI PEMERINTAH**

**(LAKIP)**



**Jln. Kemiri No. 2 Benteng**

**(0414) 21763**

**disdukpencapil@gmail.com**

**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya jualah sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diselesaikan. Laporan ini tersusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Rapublik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Format Laporan disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja adalah merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawaban Keberhasilan dan Kegagalan Misi Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja melalui sistem pertanggungjawaban secara periodic yang berdasarkan pada Renstra Tahun 2021 - 2026 serta untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023.

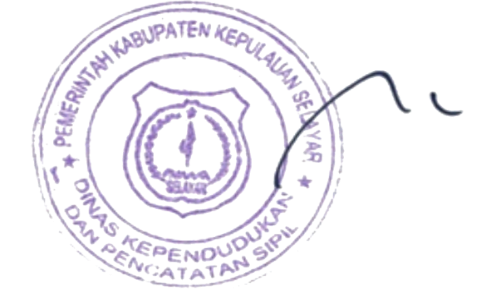
Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, meskipun demikian kami menyadari bahwa masih banyak dijumpai tantangan dan permasalahan dalam pencapaian target, namun tetap diharapkan laporan ini bisa bermanfaat dalam pengambilan kebijakan dan mampu meningkatkan kinerja untuk mengakselerasi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Optimisme yang tinggi senantiasa dimiliki untuk meningkatkan kinerja di tahun – tahun yang mendatang, Semoga Laporan Lakip ini

bisa bermanfaat dan berguna untuk kemajuan Kabupaten Kepulauan Selayar dan semoga segala upaya baik selalu mendapat Ridha dan Perlindungan dari Allah SWT, Amin.

Benteng, 30 Februari 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN**

 **DAN PENCATATAN SIPIL,**

**Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670905 198811 1003

**DAFTAR ISI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KATA PENGANTAR | .................................................................... | i |
| DAFTAR ISI ………………………………………………………………….. | | iii |
| BAB. I : PENDAHULUAN …………………………………..……………. | | 1 |
| 1. Latar Belakang ………..………………………………………………… | | 1 |
| 1. Maksud dan Tujuan ..…………………………………………………. | | 1 |
| 1. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah .……………… | | 2 |
| 1. Isu-Isu Stategis .………………………………………………………… | | 8 |
| BAB.II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ………..…. | | 10 |
| 1. Rencana Strategis ..……………………………………………………. | | 10 |
| 1. Indikator Kinerja Utama ………………………..……………………. | | 18 |
| 1. Rencana Kinerja Tahunan …………………………………..………. | | 21 |
| 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 …………..………………………… | | 23 |
| BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA …………………………..……… | | 25 |
| A. Pengukuran Kinerja ..…………..……………………………………..  B. Analisis Capaian Kinerja ..…………………..……………………….  C. Realisasi Keuangan ..……….………………………………………… | | 25  27  59 |
| BAB. IV : PENUTUP ..………………….……………………………….. | | 71 |
| LAMPIRAN   * PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 | |  |

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, system tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotism, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatebn Kepulauan Selayar berpedoman pad Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu Penyusunan LKIP mengacu pada Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, Renstra OPD, Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

1. **Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator kinerja Utama

(IKU) perangkat daerah dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 - 2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 bertujuan sebagai sarana untuk menyampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan (Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercyakan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar. Selaian sebagai bahan evalusi Akuntabilitas Kinerja, LAKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Menjadikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar yang akuntabel sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsip terhadap aspirasi masyarakat;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. **Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**
6. **Tugas, Fungsi dan Wewenanng Organisasi**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 129 Tahun 2021 merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Pemerintah Daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatatn Sipil menyelenggarankan fungsi :

a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

1. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait Tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, meliputi:
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
4. Sub Bagian Perencanaan; dan
5. Sub Bagian Keuangan.
6. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
7. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
8. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
9. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
10. Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPALA DINAS**

**SEKRETARIS**

**JABATAN FUNGSIONAL**

SUBBAGIAN PERENCANAAN

SUBBAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

**BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

**BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

**BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN**

SUB KORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB KORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB KORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB KORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

UPTD

**2. Sumber Daya**

* 1. Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang terpenting dalam suatu organisasi. Kemampuan sumber daya dipengaruhi oleh beberapa faktor antar lain tingkat pendidikan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki sumber daya manusia sesuai kondisi per 31 Desember 2023 sebanyak 63 orang terdiri dari pejabat struktural berjumlah 9 0rang, fungsional khusus berjumlah 5 orang, funsional umum berjumlah 8 Orang dan Pegawai Non ASN berjumlah 41 orang dengan menurut Pangkat/Gol.Ruang dan jenjang pendidikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.1

Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Gol. Ruang

Per 31 Desember 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Pangkat/Gol.Ruang | Jumlah Pegawai | Persentase Terhadap Pegawai (ASN) |
| I | Golongan IV |  |  |
|  | IV/c | 1 | 4,54 |
|  | IV/b | 1 | 4,54 |
|  | IV/a | 5 | 22,73 |
|  | Golongan III |  |  |
|  | III/d | 6 | 27,27 |
|  | III/c | 1 | 4,54 |
|  | III/b | 3 | 13,64 |
|  | III/a | 2 | 9,10 |
|  | Golongan II |  |  |
|  | II/d | 2 | 9,10 |
|  | II/c | 1 | 4,54 |
|  | II/b | 0 | 0 |
|  | II/a | 0 | 0 |
|  | Jumlah | 22 | 100 |

*Sumber : Disdukpencapil Kepulauan Selayar Tahun 2022*

Tabel 2.1.2

Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Per 31 Desember 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDM | Jumlah | Pendidikan Terakhir | | | |
| S2 | S1 | D3 | SMA |
| Pejabat Struktural | 9 | 2 | 7 |  |  |
| Fungsional Khusus | 5 | 2 | 3 |  |  |
| Fungsional Umum | 8 |  | 3 | 1 | 4 |
| Tenaga Kontrak | 41 | 1 | 12 |  | 28 |
| Jumlah | 63 | 5 | 25 | 1 | 32 |

*Sumber : Disdukpencapil Kepulauan Selayar Tahun 2023*

* 1. Sarana dan Prasarana

Gambaran Pelayanan Pemerintah tidak dapat dipungkiri bahwa sarana dan prasarana adalah faktor yang sangat menentukan dalam rangka terciptanya pelayanan yang prima. Kondisi saat ini sarana dan prasarana dalam mendukung fungsi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.1

Sarana dan prasarana

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | NAMA BARANG | KONDISI | | JUMLAH BARANG |
| BAIK | RB/H |  |
| 1 | Mobil | 2 | - | 2 |
| 2 | Sepeda Motor | 12 | 2 | 14 |
| 3 | Mesin Ketik Manual Standar (14-16) | - | 1 | 1 |
| 4 | Mesin Ketik Listrik | - | 1 | 1 |
| 5 | Lemari besi | 8 | - | 8 |
| 6 | Rak Besi | 7 | - | 7 |
| 7 | Brangkas | 1 | - | 1 |
| 8 | Mesin Absensi | 1 | - | 1 |
| 9 | Mesin Laminating | - | 1 | 1 |
| 10 | Mesin Potong KTP | - | 1 | 1 |
| 11 | Mesin Pemotong Rumput | - | 1 | 1 |
| 12 | Flasdisk | - | 2 | 2 |
| 13 | Hardiks | 4 | - | 4 |
| 14 | Signature Pad | 2 | - | 2 |
| 15 | Lemari Kayu | 3 | - | 3 |
| 16 | Kursi Besi | 2 | - | 2 |
| 17 | Kursi Kayu | 2 | - | 2 |
| 18 | Meja Rapat | 1 | - | 1 |
| 19 | Meja Panjang | 1 | - | 1 |
| 20 | Kursi Tamu | 2 | - | 2 |
| 21 | Meja 1 Biro | 9 | 5 | 14 |
| 22 | Meja ½ Biro | 7 | 22 | 29 |
| 23 | Kursi Rapat | - | 1 | 1 |
| 24 | Kursi Putar | - | 22 | 22 |
| 25 | Kursi Lipat | - | 15 | 15 |
| 26 | Meja Komputer | - | 4 | 4 |
| 27 | AC | 11 | 6 | 17 |
| 28 | Dispenser | 1 | - | 1 |
| 29 | Televisi | 1 | - | 1 |
| 30 | Kulkas | 2 | - | 2 |
| 31 | P.C Unit / Komputer PC | 16 | 24 | 40 |
| 32 | Laptop | 21 | 13 | 34 |
| 33 | Note Book | - | 2 | 2 |
| 34 | Monitor | - | 6 | 6 |
| 35 | Printer | 16 | 30 | 46 |
| 36 | Printer KIA | 2 | - | 2 |
| 37 | Printer KTP | 3 | - | 3 |
| 38 | Scanner | - | 8 | 8 |
| 39 | UPS | 2 | 13 | 15 |
| 40 | Peralatan Personal Komputer (Baterai UPS) | - | 6 | 6 |
| 41 | Server | 3 | 3 | 6 |
| 42 | Genset | - | 6 | 6 |
| 43 | Peralatan Jaringan lainnya | - | 4 | 4 |
| 44 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 1 | 1 | 2 |
| 45 | Meja kerja Pejabat Eselon III | 2 | 1 | 3 |
| 46 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 4 | 1 | 5 |
| 47 | Kursi kerja Pejabat Eselon IV | - | 4 | 4 |
| 48 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 95 | 12 | 107 |
| 49 | Kursi Tamu diruangan Pejabat Eselon II | 2 | 1 | 3 |
| 50 | Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis | - | 2 | 2 |
| 51 | Layar Film/Proyektor | - | 1 | 1 |
| 52 | Proyektor + attachment | 1 | - | 1 |
| 53 | Camera Eletronic | 2 | 5 | 7 |
| 54 | Handphone | 1 | - | 1 |
|  | Jumlah | 250 | 227 | 477 |

1. **Isu-Isu Strategis**

Isu–isu strategis dibidang Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

1. Dalam rangka integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga tercapai akurasi database, regulasi pemerintah dibidang penyelenggaraan adminduk (Undang–undang Nomor 23 tahun 2006, PP Nomor 37 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 serta PP Nomor 41 Tahun 2007) harus dilaksanakan secara keseluruhan,berkesinambungan dan terus menerus melalui :
2. Penyediaan Aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran

penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan

informasi) yang terintegrasi kedalam satu sistem, yaitu SIAK

Terpusat.

1. Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,

pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) melalui system

/online.

1. Penyediaan database penduduk yang lengkap,akurat dan up to date.
2. Penyediaan sumber daya manusia secara kuantitas ( seleksi atas pegawai pindahan, penempatan pegawai sesuai luas wilayah/banyaknya pelayanan) dan kualitas (peningkatan pengetahuan/bimtek, penyegaran/rotasi, penempatan dengan kualitas SDM yang merata disetiap bidang/wilayah).
3. Proses Pengolahan Data dan pengaksesan data untuk kepentingan pemerintah ataupun penduduk/pemohon menjadi terbatas disebabkan karena beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dari SIAK Terdistribusi menjadi SIAK Terpusat.
4. Pelayanan Identitas Kependudukan Digital.
5. Peningkatan Kualitas Kependudukan dalam rangka persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024.
6. Mekanisme/pola penyimpangan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat di akses melalui teknologi.
7. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, murah, cepat, transparan dan dekat dengan masyaratat.
8. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
9. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (penanggulangan kemiskinan Ekstrim dll).
10. Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan publik serta tugas dan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil, wajib di siapkan :Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

**BAB II**

**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Tahun 2021 – 2026 yang merupakan tolak ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya PRJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sebagai dokumen teknis operasional.

1. **Rencana Strategis**

Penyusunan Renstra mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, dan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Tahun 2021-2026 yang memuat Visi, Misi, tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja utama, program dan kegiatan. Adapun proses perumusan yang Panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kompetensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Perencanaan strategis langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global publik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

**1. Visi**

Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih merupakan landasan perumusan tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 ( lima ) tahun demi mencapai tujuan utama pembangunan daerah. Visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan amanat untuk dijadikan landasan penyusunan dokumen RENSTRA SKPD yang akan dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Mengacu pada uraian diatas serta memperhatikan arah kebijakan tahun ketiga dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026, RPJPD tahun 2005 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2019 - 2024, dan Rencana tata Ruang kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 - 2023, serta RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2032, subtansi RPJM Nasional 2020 – 2024, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah kabupaten kepulauan selayar, serta visi misi Bupati/Wakil Bupati, maka ditetapkan visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2021 -2026 adalah :

***“ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”***

Dari rumusan visi ini terdapat 2 (Dua) pokok visi, yaitu :

1. ***Bandar Maritim*** adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengankepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan
2. ***Kawasan Timur Indonesia*** menunjukkan bahwa berada pada Kawasan TimurIndonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, indusrti, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini :

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”
2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Dengan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut :

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta manjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.
5. **Misi**

Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode 5 (lima) tahun RPJMD 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan. Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanaan publik yang berkualitas.
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan. Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunaan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutaan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa menuju, serta segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa.
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauaan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.
4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan. Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.
5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan. Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunaan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutaan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

Adapun misi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

misi 1 “ **Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan “,** menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan dinas kependudukan dan pencatatan sipil jangka menengah kabupaten kepulauan selayar, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil secara keseluruhan.

1. **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan**

**dan Pencatatan Sipil**

Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan dinas kependudukan dan pencatatan sipil jangka menengah kabupaten kepulauan selayar, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil secara keseluruhan.

Terkait pelaksanaan misi Bupati/Wakil Bupati tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka telah ditetapkan program seratus hari Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu :

- Pembentukan Tim Layanan Administrasi Kependudukan Keliling.

* **Tujuan**

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Selayar berdasarkan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

“ Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah “

* **Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

1. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan
2. Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten
3. Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

**Tabel 3.1.**

**Tujuan dan Sasaran sebelum dan Setelah Reviu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan Sebelum Reviu** | **Tujuan Setelah Reviu** | **Sasaran Sebelum Reviu** | **Sasaran setelah Reviu** |
| **Misi : 1 Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Transparan** | | | |
| Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat 2. Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah 3. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | * 1. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan   2. Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten   3. Meningkatnya Kepercayaan masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah |

Tabel 3.2

TUJUAN DAN SARARAN JANGKA MENENGAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020) | | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah |  |  | 33,89 | | 55 | 64 | 68 | 73 | 76 |
| * + 1. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan | Persentase capaian kepemilikan identitas | 73,25 | | 74,33 | 75,83 | 76,17 | 77,33 | 78,5 |
| * + 1. Meningkatkan Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten   3.Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah | kependudukan  Persentase capaian pemanfaatan data kependudukan skala kabupaten | 73,85 | | 88,46 | 94,23 | 94,23 | 95 | 100 |
| - Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | | n/a | 72,6 | 73,6 | 74,6 | 75,6 | 76,6 |
| - Nilai Sakip Perangkat  Daerah   * Laporan Keuangan | | 64,53  (B) | 66,74  (B) | 67,69  (B) | 69,82  (B) | 72,45  (BB) | 75,04  (BB) |
| * Perangkat daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) | | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |

*Sumber : Renstra Disdukpencapil 2021-2026*

**B. Indikator Kinerja Utama**

Indiktor Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran RPJMD pada setiap tahun berjalan. Bendasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 05/I/Disdukcapil Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah sebagai berikut

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Tahun 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN/FORMULASI** | **SUMBER DATA** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan | * + - 1. Persentase Penerbitan KTP-Elektronik (KTP-El) | **Formulasi :** Jumlah KTP yang Diterbitkan  x 100 %  Jumlah Penduduk Wajib KTP  Target : 97 % | Renstra |
|  |  | * + - 1. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) | **Formulasi :** Jumlah Anak usia 0-17 Tahun (0-18 Tahun Kurang  1 hari) yang sudah memiliki KIA  yang x 100 % Jumlah anak 0 -17 tahun (0-18 Tahun Kurang 1 Hari)  Target : 35 % | Renstra |
|  |  | 3. Persentase Cakupan akta  Pencatatan Sipil | **Formulasi :** Jumlah Persentase Penerbitan Akta  Pencatatan Sipil  x 100 %  Jumlah Jenis Layanan  Target : 94 % | Renstra |
|  | Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten | 4. Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama | **Formulasi :** Jumlah OPD yang telah memanfaatkan  data kependudukan berdasarkan  perjanjian kerjasama  x 100 %  Jumlah OPD  Target : 76.92 % | Renstra |
|  |  | 5. Persentase Ketersediaan Data Profil Kependudukan | **Formulasi :** Jumlah Data profil yang tersedia  x100 %  Jumlah Data profil yang diolah  Target : 100 % | Renstra |

1. **Indikator Kinerja Tahun 2023**

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut SKPD menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja SKPD. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara subtantif tidak jauh berbeda dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2023 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis SKPD Tahun 2021 – 2026. Pada dasarnya RKT Tahun 2023 menguraian target kinerja yang hendak dicapai SKPD selama tahun 2023. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisassi dalam upaya pencapaian visi dan misinya.

Target sasaran untuk tahun 2023 merupakan target tahun kedua dari Renstra SKPD tahun 2021 – 2026 dan rencana kinerja sasaran memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai. RKT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

**Rencana Kinerja Tahunan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target** |
| 1.  2.  3. | Meningkatnya tata kelola administrasi kependudukan  Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala kabupaten  Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah | 1. Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)  2. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)  3. Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil  1. Persentase OPD yang telah memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama  2. Persentase Ketersediaan Data Profil kependudukan   * Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil * Nilai Sakip Perangkat Daerah * Nilai Laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP | 97 %  35 %  94 %  76,92 %  100 %  73,6 %    67,69  (B)  Sesuai |

**Sumber : Renstra Disdukpencapil 2021-2026**

**D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Perjanjian Kinerja tahun 2023 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala SKPD dengan Bupati Kepulauan Selayar untuk mewujudkan target kinerja tahun kedua dari Renstra SKPD Tahun 2021 – 2026 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh SKPD. Perjanjian Kinerja tahun 2023 memcerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis SKPD tahun 2021 – 2026. Pada dasarnya perjanjian kinerja menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada sasaran akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi misinya. Perjanjian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
| 1.  2.  3. | Meningkatnya tata kelola administrasi kependudukan  Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala kabupaten  Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah | 1. Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)  2. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)  3. Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil  1. Persentase OPD yang telah memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama  2. Persentase Ketersediaan Data Profil kependudukan  1. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | 97 %  35 %  94 %  76,92 %  100 %  73,6 |

***Sumber : Renstra Disdukpencapil 2021-2026***

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar selaku pengemban Amanah masyarakat untuk melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP merupakan gambaran mengenai tingkat Pencapaian target masing-masing Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra, maupun Rencana Kerja tahun 2023. Sesuai dengan kententuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

* + - 1. **Pengukuran Kinerja**

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing. Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator Kinerja Sasaran Strategis dan cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi atau realisasi dengan kinerja yang diharapkan atau target kinerja yang diperjanjikan.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja adalah semakin tinggi realisasi menunjukkan Capaian Kinerja yang semakin baik, dengan perhitungan :

Realisasi

Capaian Indikator Kinerja = x 100 %

Target

Capaian Kinerja organisasi seperti yang dimaksudkan diatas tercermin dari capaian seluruh sasaran strategis/program dalam dokumen perjanjian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta meningkatnya akuntabitas kinerja, maka disetiap instansi harus menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi Perangkat Daerah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melalukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indicator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Persentase Cakupan KTP-Elektronik | % | 97 | 92,77 | 95,64 |
| 2. | Persentase Cakupan Kartu Identitas Anak (KIA) | % | 35 | 54,08 | 154,51 |
| 3. | Persentase Cakupan akta Pencatatan Sipil | % | 94 | 86,96 | 92,51 |
| 4. | Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarka perjanjian kerjasama | % | 76,92 | 61,54 | 80,01 |
| 5. | Persentase ketersediaan data Profil kependudukan | % | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | % | 73,6 | 88,56 | 120,33 |

**Sumber : Data Capaian Disdukpencapil Tahun 2023**

* + - 1. **Analisis Capaian Kinerja**

Analisis capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 berdasarkan Sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat pada penjelasan tabel -tabel berikut ini :

**B.1. Sasaran 1** : **Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan**

Capaian sasaran 1 : meningkatnya tata kelola administrasi kependudukan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel B.1.1

Analisis Pencapaian Sasaran

Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Sasaran | Target  Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2023 | | Capaian | Rata-Rata Capaian sasaran terhadap Target 2023 |
| Target | Realisasi |
| 1 | Persentase capaian kepemilikan identitas kependudukan | 75,83 % | Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-El) | % | 97 | 92,77 | 95,64 | 95,64 + 154,51 + 92,51  X 100%  3  =114,22 |
| Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) | % | 35 | 54,08 | 154,51 |
| Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil | % | 94 | 86,96 | 92,51 |

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian indicator kinerja pada persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-El) pada Tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 97 % dengan realisasi hanya sebesar 92,77 % sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 95,64. Sementara capaian indicator kinerja pada persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Tahun 2023 sudah melampaui target yang telah ditentukan yaitu 35 % dengan realisasi sebesar 54,08 %, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 154,51 %. Dan untuk capaian indicator kinerja pada persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil adalah sebesar 86,96 % dari target 94 % sehingga persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 92,51 %. Dengan demikian dapat diketahui bahwa capaian indicator sasaran yaitu persentase capaian kepemilikan identitas kependudukan adalah sebesar 114,22 %. Ini menunjukkan bahwa sesuai dengan kinerja maka capaian atas kepemilikan identitas kependudukan Tahun 2023 sudah termasuk dalam kriteria sangat baik dimana capaian sasarannya sudah melampaui target yang telah ditetapkan.

Data Pendukung capaian Kinerja Sasaran 1 Dapat dilihat pada tabel berikut :

Persentase Cakupan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)

Tabel B.1.2

Data Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)

Di Kabupaten Kepulauan Selayar

Per 31 Desember 2023

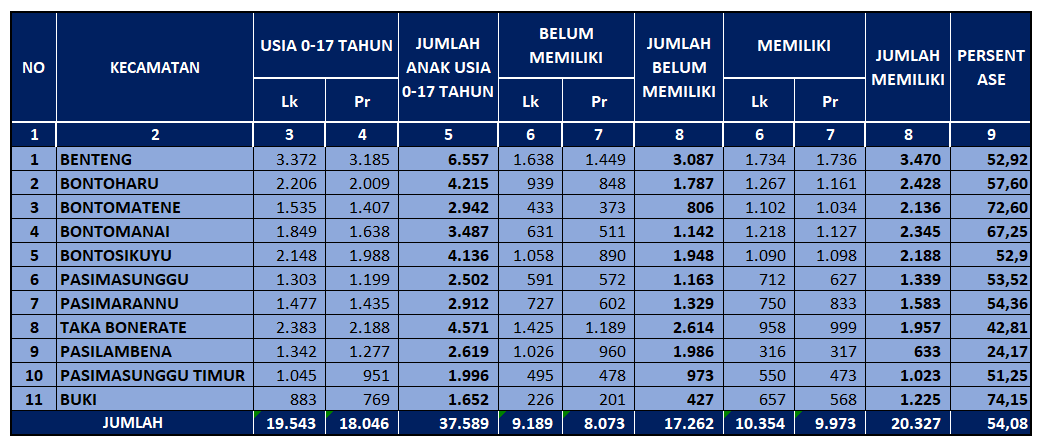
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KECAMATAN** | **WAJIB KTP** | | **SUDAH REKAM** | | **%** | | **BELUM REKAM** | | **%** |
|  |
| **1** | **2** | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** |  |
| **1** | **BENTENG** | 18.138 | | 16.848 | | 92,89 | | 1.290 | | 7,66 |  |
| **2** | **BONTOHARU** | 11.146 | | 10.734 | | 96,30 | | 412 | | 3,84 |  |
| **3** | **BONTOMATENE** | 10.730 | | 10.183 | | 94,90 | | 547 | | 5,37 |  |
| **4** | **BONTOMANAI** | 10.730 | | 10.199 | | 95,05 | | 531 | | 5,21 |  |
| **5** | **BONTOSIKUYU** | 11.923 | | 11.409 | | 95,69 | | 514 | | 4,51 |  |
| **6** | **PASIMASUNGGU** | 6.788 | | 6.036 | | 88,92 | | 752 | | 12,46 |  |
| **7** | **PASIMARANNU** | 8.045 | | 7.211 | | 89,63 | | 834 | | 11,57 |  |
| **8** | **TAKA BONERATE** | 10.143 | | 8.860 | | 87,35 | | 1.283 | | 14,48 |  |
| **9** | **PASILAMBENA** | 5.966 | | 5.284 | | 88,57 | | 682 | | 12,91 |  |
| **10** | **PASIMASUNGGU TIMUR** | 6.150 | | 5.599 | | 91,04 | | 551 | | 9,84 |  |
| **11** | **BUKI** | 5.301 | | 5.104 | | 96,28 | | 197 | | 3,86 |  |
| **JUMLAH** | | | **105.060** | | **97.467** | | **92,77** | | **7.593** | **7,79** |  |

Persentase Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Tabel B.1.3

Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Di Kabupaten Kepulauan Selayar

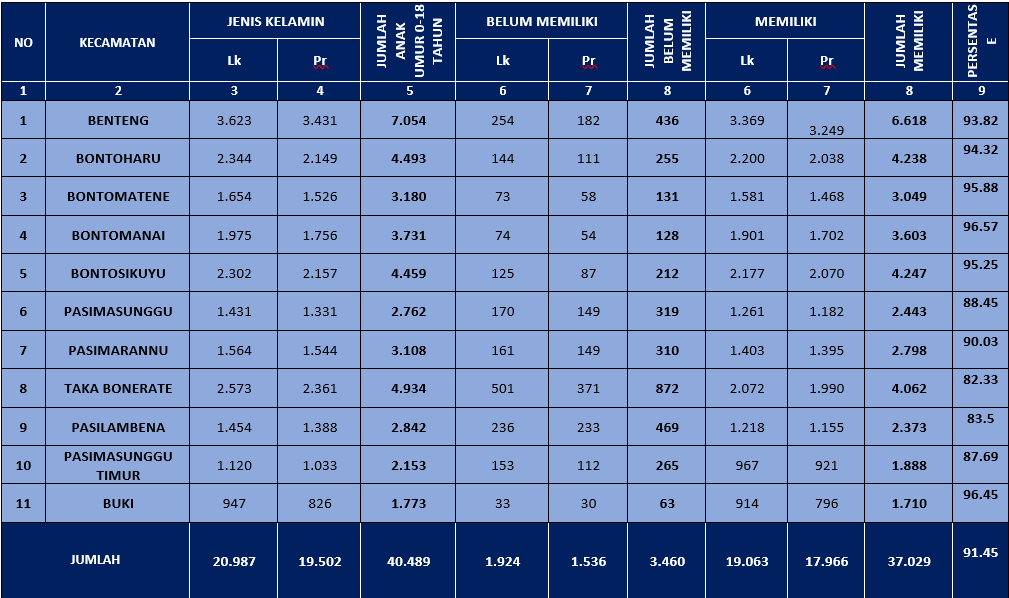
 Per 31 Desember 2023

Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Tabel B.1.4

Data Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0 - 18

Di Kabupaten Kepulauan Selayar

Per 31 Desember 2023

Persentase Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan

Tabel B.1.5

Data Kepemilikan Akta Perkawinan Penduduk Non Muslim

Di Kabupaten Kepulauan Selayar

Per 31 Desember 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KECAMATAN** | **JUMLAH PERKAWINAN YANG DILAPORKAN** | **JUMLAH PENERBITAN AKTA PERKAWINAN** | **PERSENTASE (%)** |
|  |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** |  |
| **1** | **BENTENG** | 5 | 5 | 100 |  |
| **2** | **BONTOHARU** | - | - | - |  |
| **3** | **BONTOMATENE** | 1 | 1 | 100 |  |
| **4** | **BONTOMANAI** | - | - | - |  |
| **5** | **BONTOSIKUYU** | - | - | - |  |
| **6** | **PASIMASUNGGU** | - | - | - |  |
| **7** | **PASIMARANNU** | - | - | - |  |
| **8** | **TAKA BONERATE** | - | - | - |  |
| **9** | **PASILAMBENA** | - | - | - |  |
| **10** | **PASIMASUNGGU TIMUR** | - | - | - |  |
| **11** | **BUKI** | - | - | - |  |
| **JUMLAH** | | **6** | **6** | **100** |  |

Persentase Cakupan Penerbitan Akta Perceraian

Tabel B.1.5

Data Kepemilikan Akta Perceraian Penduduk Non Muslim

Di Kabupaten Kepulauan Selayar

Per 31 Desember 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KECAMATAN** | **JUMLAH PERCERAIAN YANG DILAPORKAN** | **JUMLAH PENERBITAN AKTA PERCERAIAN** | **PERSENTASE (%)** |
|  |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** |  |
| **1** | **BENTENG** | 1 | 1 | 100 |  |
| **2** | **BONTOHARU** | - | - | - |  |
| **3** | **BONTOMATENE** | - | - | - |  |
| **4** | **BONTOMANAI** | - | - | - |  |
| **5** | **BONTOSIKUYU** | - | - | - |  |
| **6** | **PASIMASUNGGU** | - | - | - |  |
| **7** | **PASIMARANNU** | - | - | - |  |
| **8** | **TAKA BONERATE** | - | - | - |  |
| **9** | **PASILAMBENA** | - | - | - |  |
| **10** | **PASIMASUNGGU TIMUR** | - | - | - |  |
| **11** | **BUKI** | - | - | - |  |
| **JUMLAH** | | **1** | **1** | **100** |  |

Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Tabel B.1.6

Data Kepemilikan Akta Kematian

Di Kabupaten Kepulauan Selayar

Per 31 Desember 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KECAMATAN** | **JUMLAH KEMATIAN YANG DILAPORKAN** | **JUMLAH PENERBITAN AKTA KEMATIAN** | **PERSENTASE (%)** |
|  |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** |  |
| **1** | **BENTENG** | **120** | **120** | **100** |  |
| **2** | **BONTOHARU** | **44** | **43** | **97,73** |  |
| **3** | **BONTOMATENE** | **74** | **51** | **68,92** |  |
| **4** | **BONTOMANAI** | **57** | **57** | **100** |  |
| **5** | **BONTOSIKUYU** | **43** | **42** | **97,67** |  |
| **6** | **PASIMASUNGGU** | **23** | **23** | **100** |  |
| **7** | **PASIMARANNU** | **16** | **16** | **100** |  |
| **8** | **TAKA BONERATE** | **27** | **27** | **100** |  |
| **9** | **PASILAMBENA** | **8** | **8** | **100** |  |
| **10** | **PASIMASUNGGU TIMUR** | **12** | **11** | **91,67** |  |
| **11** | **BUKI** | **24** | **22** | **91,67** |  |
| **JUMLAH** | | **448** | **420** | **93,75** |  |

Tabel B.1.7

Perbandingan Realisasi Capaian kinerja Tahun 2022 dan 2023 pada sasaran meningkatnya tata kelola administrasi kependudukan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Sasaran | Target Sasaran 2023 | Indikator Kinerja | 2022 | | | | | 2023 | | | | |
| Target | | Realisasi | Capaian | Target | | | Realisasi | Capaian |
| 1. | Persentase capaian kepemilikan identitas kependudukan | 75,83 % | Persentase Cakupan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) | 97% | | 91,40% | 94,23% | 97% | | | 92,77% | 95,64% |
| Persentase Cakupan Kartu Identitas Anak (KIA) | 32% | | 50,27% | 157,09% | 35% | | | 54,08% | 154,51% |
| Persentase Cakupan Akta Pencatatan Sipil | 94% | | 96,60% | 102,77% | 94% | | | 86,96% | 92,51% |
| Rata – Rata Capaian Indikator Sasaran | | | | | 118,03 % | | | | | 114,22 % | | | | |

Dari tabel diatas diketahui bahwa :

capaian indicator kinerja pada persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-El) pada Tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 97 % dengan realisasi hanya sebesar 92,77 % sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 95,64. Akan tetapi jika di bandingkan dengan Capaian kinerja Tahun sebelumnya hanya sebesar 94,23 %. Ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun lalu.

Sementara capaian indicator kinerja pada persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Tahun 2023 sudah melampaui target yang telah ditentukan yaitu 35 % dengan realisasi sebesar 54,08 %, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 154,51 %. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 50,27 dari target 32 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 157,09 %. Ini menunjukkan bahwa selalu ada peningkatan realisasi dan capaian kinerja setiap tahunnya.

Dan untuk capaian indicator kinerja pada persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil hanya sebesar 86,96 % dari target 94 % sehingga persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 92,51 %. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022 dengan target sebesar 94 % dan realisasi sebesar 96,60 % dengan capaian kinerja sebesar 102,77 %, ini menunjukkan adanya penurunan tingkat realisasi maupun capaian kinerja yang signifikan. Adanya penurunan capaian ataupun target yang tidak tercapai dari 2 indikator kinerja disebabkan karena tidak tersedianya anggaran untuk pelayanan keliling ke wilayah kecamatan baik daratan maupun kepulauan untuk melakukan pelayanan perekaman dan penerbitan KTP. Selain itu tidak tersedianya jaringan yang memadai di wilayah Kecamatan Kepulauan sehingga sulit bagi masyarakat kepulauan untuk mengurus administrasi kependudukan lewat layanan online yang telah tersedia di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa capaian indicator sasaran yaitu persentase capaian kepemilikan identitas kependudukan adalah sebesar 114,22 % dari target yang telah ditetapkan di dalam Renstra Tahun 2021 – 2026 sebesar 75,83 %. Jika dibandingkan dengan Realisasi indicator sasaran Tahun 2022 sebesar 118,03 %, ini menunjukkan bahwa ada penurunan capaian indikator sasaran sebesar 3,81 %. Namun demikian sesuai dengan kinerja maka capaian persentase kepemilikan identitas kependudukan tahun ini telah melampaui target yaitu sebesar 114,22 % yang artinya telah berhasil dengan tingkat capaiannya yang sangat baik. Akan tetapi masih ada 2 indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu Persentase Cakupan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) dan Persentase Cakupan Akta Pencatatan Sipil. Hal ini disebabkan karena tidak tersedianya pembiayaan/penganggaran pelayanan keliling di Kecamatan Daratan maupun Kepulauan dalam rangka pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan, selain itu sarana dan prasarana pelayanan sudah tidak memadai.

Tabel B.1.8

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak

terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program** | **Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Pagu Anggaran** | **Realisasi Anggaran** | **Output** | **Dampak Baik/ Kurang** |
| 1. | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota** | **1. Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **200.000.000,-** | **199.821.512,-** |  |  |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200.000.000,- | 199.821.512,- | Terlaksananya penyelenggaraan rapat konsultasi dan koordinasi SKPD | Baik |
| 2. | **Program Pendaftaran Penduduk** | **1. Penataan Pendaftaran Penduduk** | **44.562.000,-** | **44.562.000,-** |  |  |
|  |  | 1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan terkait Pendaftaran penduduk | 44.562.000,- | 44.562.000,- | Dokumen Kependudukan | Baik |
|  |  | **2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | **150.000.000**,- | **149.974.850**,- |  |  |
|  |  | Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | 150.000.000,- | 149.974.850,- | Dokumen Kependudukan | Baik |
| 3. | **Program Pencatatan Sipil** | **1. Pelayanan Pencatatan Sipil** | **41.640.000**,- | **41.625.000,-** |  |  |
|  |  | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | 41.640.000,- | 41.625.000**,-** | Penerbitan Akta Pencatatan Sipil | Baik |
|  |  | **Jumlah** | **436.202.000,-** | **435.983.362,-** |  |  |

***Sumber : DPA Disdukpencapil Tahun 2023***

Tabel B.1.9

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Sasaran | Indikator | Satuan | Kinerja | | | | | Keuangan | | | |  | |
| Target | Realisasi | % | | Program | | Pagu | Realisasi | % | |
| 1. | Meningkatnya tata kelola administrasi kependudukan | Persentase Cakupan KTP-El. | % | 97 | 92,33 | 95,19 | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | 200.000.000,- | 199.821.512,- | 99,91 | |
| Persentase Cakupan KIA | % | 35 | 54,08 | 154,51 | | Program Pendaftaran Penduduk | | 194.562.000,- | 194.536.850,- | 99,99 | |
| Persentase Cakupan Akta Pencatatan Sipil | % | 94 | 52 | 55 | | Program Pencatatan Sipil | | 41.640.000,- | 41.625.000,- | 99,96 | |
| RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR | | | | | 101,57 | | TOTAL PER SASARAN | 436.202.000,- | 435.983.362,- | 99,95 | |
| TINGKAT EFISIENSI 1,62 | | | | | | | | | | | | | |
| TINGKAT EFEKTIFITAS 100,76 | | | | | | | | | | | | | |

**Sasaran 2 : Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten**

Capaian sasaran 2 : Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala kabupaten dapat dilihat pada table berikut :

Tabel B.2.1

Analisis Pencapaian Sasaran

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator  Sasaran | Target  Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2023 | | | Capaian | Rata-rata Capaian Sasaran Terhadap Target 2023 |
| Target | Realisasi | |
| 1 | Persentase Capaian Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten | 94,23 % | Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama | % | 76,92 | 16 OPD  X 100 %  26 OPD  = 61,54 | 80,01 | | 80,01 + 100  X 100%  2  = 90,01 |
| Persentase ketersediaan data profil kependudukan | % | 100 | 100 | 100 | |  |

Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten

Tabel B.2.2

Data Pendukung capaian Kinerja Sasaran 1 Dapat dilihat pada tabel berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **OPD Yang memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama** | **Tujuan Kerja Sama** |
| 1 | Dinas Sosial | Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Sosial |
| 2 | Dinas Perikanan | Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Perikanan |
| 3 | Dinas Kesehatan | Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Kesehatan |
| 4 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 5 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan daerah | Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah |
| 6 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 7 | Dinas Lingkungan Hidup | Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Lingkungan Hidup |
| 8 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 9 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 10 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 11 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 12 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 13 | RSUD KH. Hayyung | Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas RSUD KH. Hayyung |
| 14 | Badan Kesbangpol | Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Badan Kesbangpol |
| 15 | Pengadilan Agama Selayar Kelas II | Pelayanan Terpadu Masyarakat secara Prima melalui siding Isbat Nikah, Pembuatan Buku Nikah/Akta Nikah dan Penerbitan dokumen – dokumen kependudukan berupa : KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta kematian dan Akta Pengesahan Anak serta dokumen lainnya |
| 16 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Badan Kesbangpol |

Tabel B.2.3

Perbandingan Realisasi Capaian kinerja Tahun 2022 dan 2023 pada sasaran meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Sasaran | Target  Sasaran 2023 | Indikator  Kinerja | Satuan | 2022 | | | 2023 | | |
| Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Persentase Capaian Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten | 94,23 % | Persentase Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama | % | 76,92 | 44,44 | 77,03 | 76,92 | 61,54 | 80,01 |
| Persentase ketersediaan data profil kependudukan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rata – Rata Capaian Indikator Sasaran | | | | | 88,52 % | | | 90,01 % | | |

Berdasarkan data perbandingan pada tabel 13 maka dapat diketahui bahwa :

* + - 1. Pada Tahun 2023 terdapat 16 Unit OPD dari 26 OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan dan menggunakan data kependudukan atau sebesar 61,54 % dari target 76,92 % dengan capaian sebesar 80,01 %. Ini menunjukkan bahwa realisasi atas indicator kinerja pertama belum mencapai target yang tertera pada Renstra 2021 – 2026, sama halnya dengan capaian indicator kinerja pada Tahun 2022 bahwasanya persentase jumlah pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama belum tercapai dimana realisasinya hanya sebesar 44,44 % dengan target pada renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah 76,92 %.
      2. Kemudian realisasi pada Indikator Kinerja persentase ketersediaan dat profil kependudukan baik untuk Tahun 2022 maupun Tahun 2023 sudah mencapai 100 % dari target yang telah ditentukan dalam renstra 2021-2026 yaitu sebesar 100 %. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan data profil kependudukan sudah sangat baik.
      3. Tetapi jika dilihat dari target sasaran Tahun 2023 yakni sebesar 94,23 % maka dapat diketahui bahwa target sasaran meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala kabupaten belum tercapai dimana rata rata capaian sasaran terhadap target hanya sebesar 90,01 %. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasinya sudah mencapai bahkan melampaui target sebesar 0,06 dimana realisasinya adalah 88,52 % dari target 88,46 %. Ini menunjukkan adanya penurunan capaian sasaran, hal ini disebabkan karena adanya peraturan Menteri Dalam Negeri No 102 Tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan terdapat perubahan mekanisme dan prosedur dalam permohonan atau pengajuan hak akses pemanfaatan data kependudukan. Dimana mekanisme dan prosedur perolehan hak akses pemanfaatan data kependudukan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kementrian Dalam Negeri dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Selain itu penyebab menurunnya capaian kinerja sasaran disebabkan karena adanya penambahan persyaratan dalam mengajukan hak akses pemanfaatan data kependudukan bagi OPD pengguna data dimana OPD pengguna data kependudukan harus memiliki sertifikat ISO sementara belum ada satupun OPD di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki Sertifikat ISO.
      4. Sejak Tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengajukan izin PKS (Perjanjian Kerjasama) sebanyak 18 OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun dari 18 OPD tersebut baru 16 yang yang diberikan izin PKS (Perjanjian Kerjasama) dan diantaranya baru 3 OPD yang telah diberi hak akses pemanfaatan data kependudukan. Hal ini menjadi kendala bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar karena kecepatan dalam mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan tergantung dari respon Direktorat Jenderal

Dukcapil. Akan tetapi secara berkelanjutan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil akan terus mengajukan permohonan hak akses pemanfaatan data kependudukan bagi OPD yang belum sama sekali mengajukan kerjasama maupun bagi OPD yang belum memperbaharui PKS (Perjanjian Kerjasama) sesuai peraturan yang berlaku.

Tabel B.2.4

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak

terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program** | **Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Pagu Anggaran** | **Realisasi Anggaran** | **Output** | **Dampak Baik/ Kurang** |
| 1. | **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **12.000.000,-** | **11.884.000,-** |  |  |
|  | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan,, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan | 12.000.000,- | 11.884.000,- | Terlaksananya penyelenggaraan Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan administrasi kependudukan | Baik |
|  |  | **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **55.630.000,-** | **55.556.724,-** |  |  |
|  |  | Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 38.000.000,- | 37.983.524,- | Laporan Data Kependudukan | Baik |
|  |  | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 17.630.000,- | 17.573.200,- | Perjanjian Kerjasama dengan OPD terkait | Baik |
| 3. | **Program Pengelolaan Profil Kependudukan** | **1. Penyusunan Profil Kependudukan** | **24.000.000**,- | **23.999.999,-** |  |  |
|  |  | Penyusunan Profil dan Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain | 24.000.000,- | 23.999.999,- | Buku Profil Kependudukan | Baik |
|  |  | **Jumlah** | **91.630.000,-** | **91.440.723,-** |  |  |

***Sumber : DPA Disdukpencapil Tahun 2023***

Tabel B.2.5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | | | Keuangan | | | |  |
| Target | Realisasi | % | | Program | | | Pagu | Realisasi | % |
| 1. | Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten | Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama | % | 76,92 | 61,54 | 80,01 | | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | 67.630.000,- | 67.440.724,- | 99,72 |
| Persentase ketersediaan data profil kependudukan | % | 100 | 100 | 100 | | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | | | 24.000.000,- | 23.999.999,- | 99,99 |
| RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR | | | | | 90,01 | | | TOTAL PER SASARAN | 91.630.000,- | 91.440.723,- | 99,79 |
| TINGKAT EFISIENSI -9,78 | | | | | | | | | | | |
| TINGKAT EFEKTIFITAS 139,91 | | | | | | | | | | | |

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten

**B.3. Sasaran 3 : Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah**

Capaian sasaran 1 : meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap

pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada table berikut :

Tabel B.3.1

Analisis Pencapaian Sasaran

Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2023 | | | Capaian |
| Target | Realisasi |  | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | % | 73,6 | 88,65 | 120,45 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | 120,45 | |

***Sumber : Hasil Kussioner Pelayanan Disdukpencapil Tahun 2023***

Data Pendukung Capaian Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut adalah :

Tabel B.3.2

Rekapitulasi Survey Kepuasan Masyarakat

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | | | **Jenis Kelamin** | **Umur (Tahun)** | **Pendidikan** | **Pekerjaan** |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **U1** | | **U2** | | **U3** | | **U4** | | **U5** | **U6** | **U7** | | **U8** | | **U9** | |  |
| 1 | | | Perempuan | 17 | SMA | Pelajar | 3 | | 3 | | 2 | | 3 | | 4 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 2 | | | Perempuan | 45 | SD | PHL | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |
| 3 | | | Perempuan | 30 | S1 | PHL | 4 | | 3 | | 3 | | 4 | | 4 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |
| 4 | | | Laki-laki | 27 | S1 | Wiraswasta | 4 | | 3 | | 4 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |
| 5 | | | Perempuan | 35 | S1 | URT | 3 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 3 | | 4 | |
| 6 | | | Perempuan | 32 | S1 | URT | 3 | | 2 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |
| 7 | | | Perempuan | 40 | S1 | PNS | 3 | | 2 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |
| 8 | | | Perempuan | 30 | S1 | PHL | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | | 4 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 9 | | | Perempuan | 33 | S1 | PHL | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | | 4 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |
| 10 | | | Laki-laki | 29 | SMA | PHL | 4 | | 1 | | 4 | | 4 | | 4 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |
| 11 | | | Perempuan | 17 | SMA | Pelajar | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |
| 12 | | | Perempuan | 18 | SMA | Pelajar | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |
| 13 | | | Perempuan | 48 | SMA | PHL | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 14 | | | Perempuan | 26 | SMA | Honorer | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |
| 15 | | | Laki-laki | 45 | SMA | Wirausaha | 3 | | 3 | | 4 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |
| 16 | | | Laki-laki | 32 | SMP | Swasta | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 2 | 4 | | 4 | | 4 | |
| 17 | | | Perempuan | 25 | SMA | Honorer | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |
| 18 | | | Perempuan | 26 | S1 | Perangkat Desa | 3 | | 4 | | 3 | | 3 | | 4 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |
| 19 | | | Perempuan | 47 | SMA | Swasta | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |
| 20 | | | Perempuan | 22 | SMA | Swasta | 4 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | 3 | 4 | | 3 | | 3 | |
| 21 | | | Laki-laki | 50 | SMP | Swasta | 2 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | 3 | 3 | | 3 | | 4 | |  |
| 22 | | | Perempuan | 30 | SMA | URT | 4 | | 3 | | 4 | | 3 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |
| 23 | | | Perempuan | 22 | SMA | Staf Desa | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |
| 24 | | | Perempuan | 19 | SMP | URT | 4 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |
| 25 | | | Laki-laki | 47 | SMA | Wirausaha | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |
| 26 | | | Perempuan | 30 | SMA | Perangkat Desa | 3 | | 4 | | 3 | | 4 | | 3 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |
| 27 | | | Perempuan | 26 | S1 | PHL | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |
| 28 | | | Perempuan | 28 | SMA | URT | 3 | | 4 | | 3 | | 3 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |
| 29 | | | Laki-laki | 17 | SMA | Pelajar | 4 | | 3 | | 4 | | 4 | | 3 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |
| 30 | | | Laki-laki | 37 | S1 | Swasta | 4 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |
| 31 | | | Perempuan | 33 | D3 | Perawat | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |
| 32 | | | Perempuan | 31 | D3 | Perawat | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 33 | | | Laki-laki | 17 | SMA | Pelajar | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | |  |
| 34 | | | Laki-laki | 17 | SMA | Pelajar | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 35 | | | Laki-laki | 24 | SMA | Nelayan | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 36 | | | Perempuan | 19 | SMA | Pelajar | 3 | | 3 | | 1 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 37 | | | Perempuan | 17 | SMA | Pelajar | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 38 | | | Laki-laki | 42 | S1 | PNS | 3 | | 4 | | 3 | | 3 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 39 | | | Perempuan | 17 | SMA | Pelajar | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | | 4 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 40 | | | Perempuan | 17 | SMA | Pelajar | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 41 | | | Perempuan | 37 | SMA | Wirausaha | 3 | | 3 | | 2 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 42 | | | Laki-laki | 35 | SMA | Swasta | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 43 | | | Perempuan | 42 | S2 | PNS | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 4 | |  |
| 44 | | | Perempuan | 37 | SMA | Swasta | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 45 | | | Perempuan | 41 | S1 | PNS | 3 | | 4 | | 3 | | 3 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 46 | | | Laki-laki | 33 | SMA | Nelayan | 4 | | 4 | | 3 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 47 | | | Laki-laki | 36 | SMA | Wirausaha | 4 | | 4 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 48 | | | Perempuan | 37 | SMA | URT | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 49 | | | Perempuan | 38 | S1 | Wirausaha | 4 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 50 | | | Perempuan | 25 | S1 | PNS | 4 | | 3 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 51 | | | Laki-laki | 23 | SMA | Wirausaha | 4 | | 3 | | 3 | | 4 | | 3 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 52 | | | Perempuan | 39 | S1 | PNS | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 3 | |  |
| 53 | | | Perempuan | 45 | S1 | PNS | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | |  |
| 54 | | | Perempuan | 47 | S1 | PNS | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 3 | |  |
| 55 | | | Perempuan | 27 | S1 | Honorer | 4 | | 4 | | 3 | | 3 | | 3 | 4 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 56 | | | Perempuan | 40 | S1 | PHL | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 57 | | | Perempuan | 37 | SMA | PHL | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 58 | | | Perempuan | 17 | SMA | Pelajar | 4 | | 4 | | 3 | | 3 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 59 | | | Perempuan | 17 | SMA | Pelajar | 4 | | 4 | | 3 | | 3 | | 4 | 4 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 60 | | | Perempuan | 26 | S1 | PNS | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 61 | | | Perempuan | 32 | S1 | PHL | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 62 | | | Perempuan | 30 | S1 | URT | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 63 | | | Laki-laki | 43 | S1 | PNS | 4 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 2 | 4 | | 3 | | 3 | |  |
| 64 | | | Perempuan | 36 | SMA | URT | 4 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 3 | |  |
| 65 | | | Perempuan | 45 | S1 | PNS | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 4 | |  |
| 66 | | | Perempuan | 37 | S1 | PNS | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 67 | | | Perempuan | 30 | SMA | PHL | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 68 | | | Laki-laki | 41 | SMA | PNS | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 69 | | | Laki-laki | 41 | S1 | PNS | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 70 | | | Perempuan | 37 | S1 | PHL | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 71 | | | Perempuan | 46 | SMA | URT | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 72 | | | Perempuan | 42 | S1 | PNS | 4 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 73 | | | Perempuan | 45 | S1 | PNS | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 3 | |  |
| 74 | | | Laki-laki | 43 | S1 | PNS | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 75 | | | Laki-laki | 34 | S1 | Swasta | 3 | | 4 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 3 | |  |
| 76 | | | Laki-laki | 38 | S1 | PHL | 3 | | 3 | | 4 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 77 | | | Laki-laki | 33 | S1 | PNS | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 78 | | | Laki-laki | 47 | S2 | PNS | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 79 | | | Perempuan | 40 | S1 | PHL | 3 | | 3 | | 4 | | 4 | | 4 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 80 | | | Perempuan | 38 | S2 | PNS | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 3 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 81 | | | Laki-laki | 43 | S1 | PNS | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 82 | | | Perempuan | 35 | SMA | Wirausaha | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 83 | | | Perempuan | 47 | SMA | PNS | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 84 | | | Perempuan | 42 | S1 | PNS | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 85 | | | Perempuan | 43 | S1 | PNS | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 86 | | | Laki-laki | 41 | SMA | PHL | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 2 | 4 | | 4 | | 3 | |  |
| 87 | | | Perempuan | 38 | SMA | URT | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 88 | | | Laki-laki | 40 | S1 | PHL | 4 | | 4 | | 4 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 89 | | | Laki-laki | 45 | SMA | Swasta | 4 | | 3 | | 3 | | 4 | | 3 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 90 | | | Perempuan | 31 | S1 | PHL | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 91 | | | Perempuan | 24 | SMA | PHL | 3 | | 4 | | 3 | | 4 | | 3 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 92 | | | Perempuan | 35 | SMA | Wirausaha | 4 | | 3 | | 3 | | 4 | | 4 | 3 | 4 | | 3 | | 1 | |  |
| 93 | | | Perempuan | 32 | S1 | PHL | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 3 | |  |
| 94 | | | Laki-laki | 33 | S1 | PNS | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 95 | | | Perempuan | 32 | SMA | Honorer | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 96 | | | Laki-laki | 37 | SMA | Wirausaha | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 1 | |  |
| 97 | | | Laki-laki | 34 | S1 | PNS | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 98 | | | Laki-laki | 30 | SMA | Petani | 4 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 2 | 4 | | 3 | | 3 | |  |
| 99 | | | Laki-laki | 41 | SMA | PNS | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 100 | | | Perempuan | 43 | S1 | PHL | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 3 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 101 | | | Perempuan | 25 | SMA | PHL | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | | 4 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 102 | | | Perempuan | 26 | S1 | PHL | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 103 | | | Laki-laki | 45 | SMA | Penyuluh | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 104 | | | Perempuan | 25 | SMA | PHL | 4 | | 3 | | 4 | | 3 | | 4 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 105 | | | Perempuan | 29 | SMA | PHL | 4 | | 3 | | 3 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 106 | | | Perempuan | 27 | SMA | PHL | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 107 | | | Perempuan | 37 | SMA | PHL | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 3 | |  |
| 108 | | | Perempuan | 31 | SMA | PHL | 4 | | 3 | | 4 | | 3 | | 4 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 109 | | | Perempuan | 25 | SMA | PHL | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 110 | | | Perempuan | 35 | SMA | Wirausaha | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 111 | | | Laki-laki | 26 | SMA | PHL | 4 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 4 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 112 | | | Perempuan | 31 | SMA | PHL | 4 | | 4 | | 4 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 113 | | | Perempuan | 38 | SI | PNS | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | | 4 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 114 | | | Perempuan | 33 | SMA | URT | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 115 | | | Perempuan | 30 | SMA | Swasta | 4 | | 4 | | 4 | | 3 | | 3 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 116 | | | Laki-laki | 45 | SMA | PNS | 4 | | 4 | | 3 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 117 | | | Laki-laki | 44 | SI | PNS | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 118 | | | Laki-laki | 48 | SMA | Wirausaha | 4 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 119 | | | Laki-laki | 23 | SI | PHL | 3 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 120 | | | Perempuan | 29 | SI | PHL | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 121 | | | Perempuan | 25 | SMA | PHL | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 122 | | | Laki-laki | 38 | SI | PNS | 4 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 123 | | | Laki-laki | 35 | SMA | PHL | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 124 | | | Perempuan | 28 | SI | PHL | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 3 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 125 | | | Perempuan | 40 | SMA | PHL | 4 | | 4 | | 4 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 126 | | | Perempuan | 40 | SMA | URT | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 127 | | | Perempuan | 25 | SMA | PHL | 3 | | 3 | | 4 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 128 | | | Perempuan | 26 | SMA | PHL | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 129 | | | Perempuan | 25 | S2 | Kontrak | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 130 | | | Perempuan | 30 | S1 | PHL | 3 | | 3 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 131 | | | Perempuan | 37 | D3 | PNS | 3 | | 3 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 132 | | | Laki-laki | 42 | SI | PNS | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 133 | | | Laki-laki | 40 | S2 | PNS | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 134 | | | Perempuan | 49 | SI | PPPK | 3 | | 4 | | 4 | | 3 | | 4 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 135 | | | Perempuan | 26 | SI | PNS | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 136 | | | Laki-laki | 35 | SI | PHL | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 137 | | | Perempuan | 35 | SMA | PHL | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 138 | | | Perempuan | 32 | SMA | PHL | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 139 | | | Perempuan | 38 | SMA | PNS | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 3 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 140 | | | Perempuan | 31 | S1 | PHL | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 141 | | | Laki-laki | 37 | S1 | Wirausaha | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 142 | | | Perempuan | 38 | S1 | PNS | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 143 | | | Perempuan | 40 | S1 | PNS | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 144 | | | Perempuan | 45 | S1 | PNS | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 145 | | | Laki-laki | 45 | S2 | PNS | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 146 | | | Perempuan | 30 | S1 | PHL | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | 2 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 147 | | | Perempuan | 42 | SMA | PHL | 3 | | 3 | | 4 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 148 | | | Laki-laki | 33 | S1 | PHL | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 3 | |  |
| 149 | | | Laki-laki | 38 | S1 | PHL | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 150 | | | Perempuan | 30 | S1 | PHL | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 151 | | | Perempuan | 51 | S1 | PNS | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 152 | | | Perempuan | 27 | SMA | PHL | 3 | | 4 | | 4 | | 4 | | 3 | 3 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 153 | | | Laki-laki | 47 | S1 | PHL | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 154 | | | Laki-laki | 23 | SMA | PHL | 4 | | 4 | | 3 | | 3 | | 3 | 2 | 4 | | 3 | | 1 | |  |
| 155 | | | Perempuan | 45 | SMA | URT | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 156 | | | Perempuan | 37 | S1 | PNS | 4 | | 3 | | 4 | | 3 | | 3 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 157 | | | Perempuan | 40 | S1 | PNS | 3 | | 4 | | 3 | | 4 | | 3 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 158 | | | Perempuan | 42 | SMA | PNS | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | 4 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 159 | | | Perempuan | 41 | S1 | PNS | 3 | | 4 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 160 | | | Laki-laki | 45 | S1 | PNS | 4 | | 4 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 161 | | | Perempuan | 43 | SMA | PNS | 3 | | 3 | | 4 | | 3 | | 4 | 4 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 162 | | | Perempuan | 31 | S1 | Wirausaha | 2 | | 3 | | 2 | | 3 | | 3 | 2 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 163 | | | Perempuan | 35 | S1 | Wirausaha | 3 | | 3 | | 2 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 164 | | | Perempuan | 33 | S1 | Wirausaha | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 165 | | | Perempuan | 35 | S1 | PHL | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 166 | | | Perempuan | 28 | S1 | PHL | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 167 | | | Laki-laki | 32 | SMA | Wirausaha | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 168 | | | Perempuan | 40 | SMA | URT | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 169 | | | Laki-laki | 32 | SMA | Wiraswasta | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 4 | |  |
| 170 | | | Perempuan | 35 | S2 | PNS | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
| 171 | | | Perempuan | 41 | SMA | PHL | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |  |
|  | **Jumlah** | | | | | | **595** | | **582** | | **579** | | **590** | **600** | **569** | | **679** | | **602** | | **661** |  | |
| **NRR/Unsur** | | | | | | **3.480** | | **3.404** | | **3.386** | | **3.450** | **3.509** | **3.327** | | **3.971** | | **3.520** | | **3.865** |  | |
| **NRR tertimbang/unsur** | | | | | | **0.387** | | **0.378** | | **0.376** | | **0.383** | **0.390** | **0.370** | | **0.441** | | **0.391** | | **0.429** | **3.546** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **88.65** | |

Keterangan :

* U1 – U9 = Unsur – Unsur Pelayanan
* NRR = Nilai Rata - Rata
* IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
* \*) = Jumlah NRR IKM Tertimbang
* \*\*) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
* NRR Per Unsur = Jumlah Nilai Perunsur dibagi
* NRR Tertimbang Per Unsur = NRR Per Unsur x 1/9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | UNSUR SKM | NRR |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | Persyaratan  Prosedur Pelayanan  Waktu Penyelesaian  Biaya/Tarif  Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan  Kompetensi Pelaksana  Perilaku Pelaksana  Sarana dan Prasarana  Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3,340  3,320  3,180  3,450  3,290  3,210  3,810  3,390  3,810 |
|  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IKM UNIT PELAYANAN (Hasil Konversi)** | **88,65** | **= (Sangat Baik)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NILAI INTERVAL (NI)** | **NILAI INTERVAL KONVEKSI** | **MUTU PELAYANAN** | **KINERJA UNIT LAYANAN** |
| 1.0000 – 2.5996 | 25.00 – 64.99 | D | Tidak Baik |
| 2.6000 – 3.0640 | 65.00 – 75.60 | C | Kurang Baik |
| 2.0641 – 3.5320 | 76.61 – 88.30 | B | Baik |
| 3.5324 – 4.0000 | 88.31 – 100.00 | A | Sangat Baik |

Dengan melihat capaian indikator Sasaran Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah khusus untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di atas maka dapat diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil telah melampaui target kinerja yang tertera pada Renstra 2021 -2026 yakni 73,6 % dengan realisasi sebesar 88,65 % sehingga capaiannya sebesar 120,45 %.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil antara tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel B.3.3

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

pada Sasaran Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja | 2022 | | | 2023 | | |
| Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | 78,75 | 85,56 | 108,65 | 73,6 | 88,65 | 120,45 |

Dari data perbandingan diatas maka diketahui bahwa realisasi IKM pada tahun 2023 adalah sebesar 88,65 dari target kinerja sasaran sebesar 73,6 % dengan capaian 120,45 % dan ini menggambarkan adanya peningkatan sebesar 3,09 % dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar 85,65 dari target 78,75 dengan capaian sebesar 108,65 %. Ini menunjukkan bahwa target kinerja sasaran indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil telah melampaui target yg telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 – 2026. Secara umum kualitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipersepsikan dalam kategori yang baik oleh Pengguna Layanan. Akan Tetapi menurut persepsi kami sebagai pelaksana layanan masih ada beberapa unsur layanan kependudukan yang sudah baik tapi masih perlu ditingkatkan kualitasnya antara lain :

* 1. Kompetensi Pelaksana dengan Nilai NRR adalah (3.327)
  2. Waktu Penyelesaian dengan Nilai NRR adalah (3.386)

Kedua unsur pelayanan tersebut sudah memenuhi Kinerja unit pelayanan dengan nilai Baik tetapi menurut kami masih perlu ditingkatkan kualitasnya melalui program/kegiatan antara lain :

* + 1. Kompetensi pelaksana
* Penambahan petugas pelayanan
* Pengembangan pelaksana pelayanan melalui diklat/bimtek.
* Penempatan Petugas Pelayanan yang menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  + 1. Waktu Penyelesaian
* Penyediaan dan penambahan fasilitas pendukung pelayanan dengan jaringan teknologi informasi yang menciptakan percepatan pelayanan.
* Penempatan petugas yang mempunyai kompetensi dengan status petugas pelayanan yang melakukan pendekatan sikap, perhatian dan tindakan guna mewujudkan pelayanan yang baik.

Tabel B.3.4

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadapcapaian kinerja Sasaran

Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program** | **Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Pagu Anggaran** | **Realisasi Anggaran** | **Output** | **Dampak Baik/ Kurang** |
| 1. | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota** | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **5.000.000,-** | **5.000.000,-** |  |  |
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.000.000,- | 5.000.000,- | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Survey Kepuasan Masyarakat, Evaluasi Renja/Renstra dan Rencana Aksi) | Baik |
|  |  | **Jumlah** | **5.000.000,-** | **5.000.000,-** |  |  |

Tabel B.3.5

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran

Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Sasaran | Indikator | Satuan | Kinerja | | | Keuangan | | | |  | |
| Target | Realisasi | % | Program | Pagu | Realisasi | % | |
| 1. | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | % | 73,6 | 88,65 | 120,45 | 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 5.000.000,- | 5.000.000 | 100 | |
|  |  | RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR | | | | 120,45 | TOTAL PER SASARAN | 5.000.000,- | 5000.000,- | 100 | |
|  |  | TINGKAT EFISIENSI 20,45 | | | | | | | | | | |
|  |  | TINGKAT EFEKTIFITAS 110,23 | | | | | | | | | | |

**B.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

Sebagai dasar perbandingan kinerja dengan target nasional, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar akan membandingkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tingkat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan target Tingkat Nasional. Berikut dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-1077 Dukcapil Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat pada Unit Kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, berikut perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kepulauan Selayar dengan target Standar nasional menurut Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja utama.

Tabel B.4.1

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional Terhadap Indikator Kinerja Utama

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran | Indikator Kinerja | | Target | Realisasi | Capaian |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna, Penerapan Buku Pokok Pemakaman, Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Kepulauan Selayar | Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota, meliputi: | |  |  |  |
| 1 | Penyelesaian  Perekaman dan  Pencetakan KTP  Elektronik | 99,4 % | 92,77% | 93,33% |
| 2 | Pencapaian Cakupan  Kepemilikan Akta  Kelahiran usia 0 – 18 Tahun kurang 1 Hari | 98 % | 91,45 % | 93,32 % |
| 3 | Penerbitan Kartu Identitas Anak  (KIA) | 50 % | 54,08 % | 108,16 % |
| 4 | Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data | 15 OPD | 16 OPD | 106,67 % |

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa perbandingan antara realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 dengan Standar Nasional menunjukkan bahwa Indikator kinerja persentase perekaman dan pencetakan KTP Elektronik dan Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 Tahun belum mencapai target dengan realisasi perekaman dan pencetakan KTP Elektronik sebesar 92,77 % dari target 99,4 % dengan capaian sebesar 93,33 % dan realisasi cakupan Kepemilikan akta kelahiran sebesar 91,45 % dari target 98 % dengan capaian sebesar 93,32 %. Belum tercapainya kedua inidikator ini disebabkan karena tertalu tingginya target nasional yang ditetapkan oleh Kemendagri dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sementara tidak ada dukungan anggaran dari Pusat baik DAK maupun APBN yang bisa mendukung terlaksananya pelayanan keliling maupun jemput bola ke penerima pelayanan baik di Kecamatan Daratan maupun di Kecamatan Kepulauan. Sementara dukungan anggaran dari APBD sendiri sangat terbatas sehingga tidak dilaksanakannya pelayanan keliling yang bisa menjadi factor pendukung tercapainya target yang telah ditetapkan.

Sementara untuk indicator kinerja Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data telah melampaui target dari target nasional yang telah ditetapkan oleh Dirjen Dukcapil dimana realisasi indicator kinerja penerbitan kartu identitas anak (KIA) adalah sebesar 54,08 % dari target nasional 50 % sehingga capaiannya sebesar 108,16 % dan untuk realisasi Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data adalah sebesar 16 OPD yang telah melakukan kerjasama dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari target nasional sebesar 15 OPD sehingga capaiannya adalah sebesar 106,67 %. Ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kepulauan Selayar untuk dua indikator ini sudah termasuk dalam kategori baik.

**B.5. Inovasi Pelayanan yang Menunjang Peningkatan Pencapaian Target Pelayanan Administrasi Kepegawaian**

Beberapa inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna menunjang pencapaian target pelayanan administrasi kepegawaian adalah sebagai berikut :

1. Layanan Adminduk melalui WhatsApp (LAKUWA) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang dapat diakses melalui nomor WhatsApp Disdukcapil dengan manfaat untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan memberi kepuasan terhadap layanan yang diberikan.
2. Sejam Layanan Kelar (SELAYAR), dengan inovasi ini diharapkan pelayanan kepada Masyarakat semakin lebih baik, cepat mulai dari proses verifikasi berkas pemohon sampai pada penerbitan dokumen kependudukan melalui dukungan berkas yang sudah lengkap. Tujuan Inovasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil guna mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, transparan dan gratis dan dapat menyediakan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berorientasi pada kepuasan Masyarakat. Sedangkan manfaatnya adalah :

Bagi pemerintah :

a. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi

b. Memiliki system pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat

c. Meningkatkan capaian dan target nasional yang telah

diterapkan serta dapat meningkatkan kinerja organisasi

2. Bagi Masyarakat :

a.memudahkan dalam pengurusan dokumen kependudukan

b.mempercepat pelyanan kepada Masyarakat

c. memberi kepuasan terhadap layanan yang diberikan

Adapun hasil yang diharapkan dari inovasi ini adalah :

1. Proses pelayanan lebih medah, lebih cepat, transparan dan gratis

2. Meningkatkan cakupan penerbitan dokumen dan target nasional yang telah di tetapkan

3. Dapat meningkatkan kinerja organisasi

1. Sistem Pelayanan Akta Kelahiran penduduk berbasis Desa Wisata (SELAYAR BISA) dengan tujuan untuk memberikan pelayanan Prima kepada Masyarakat dalam Penerbitan Akta Kelahiran. Sedangkan manfaat dari inovasi ini adalah :

1. Bagi Pemerintah :

a. Membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

b. Memiliki system pelayanan penerbitan akta kelahiran yang lebih baik

c. Meningkatkan target kepemilikan akta kelahiran

2. Bagi Masyarakat :

a. Memudahkan dalam pengurusan akta kelahiran

b. Percepatan dalam penyelesaian akta kelahiran

c. Meningkatkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya akta kelahiran

4. Anak Lahir Membawa Akta kelahiran (ALAMAKKK) yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan manfaat sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat terlayani langsung ke Rumah Sakit atau Puskesmas dan kecamatan
2. Semakin memudahkan Masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan
3. Capaian target kepemilikan akta kelahiran semakin meningkat

5. Layanan Cepat Administrasi Kependudukan (LACAK) yang bertujuan untuk Meningkatkan pelayanan Adminduk dalam bentuk pelayanan jemput bola dari pintu ke pintu dengan menjemput dan mengantarkan dokumen hasil pelayanan guna mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat dengan manfaat sebagai berikut :

1. Memudahkan dalam pengurusan dokumen kependudukan

2. Masyarakat dapat langsung terlayani dikediamannya masing - masing.

3. Mempercepat pelayanan kepada masyarakat

1. Memberikan kepuasan terhadap layanan yang diberikan

**C. Realisasi Keuangan**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai. maka melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.550.370.000,- dan Realisasi Rp. 3.478.851.335,- dengan persentase mencapai 97.99 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi = RP. 3.506.370.000
2. Belanja Modal = RP. 44.000.000

Adapun rincian anggaran belanja dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel C.1

Target Anggaran dan Kinerja, Realisasi Anggaran dan Kinerja serta Output Kegiatan

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN** | **ANGGARAN** | | | **%** | **KINERJA** | | **%** | **OUTPUT** | |
| **TARGET** | **REALISASI** | | **TARGET** | **REALISASI** |  |  |
| **I.** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota** | **3.222.538.000,-** | **3.151.248.762,-** | | **97.79%** | **Persentase capaian kinerja : 70,29 %** | **Persentase capaian kinerja : 70,29 %** | **100%** | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Perencanaan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** |
| **Persentase capaian kinerja keuangan : 85 %** | **Persentase capaian kienrja keuangan : 84,38 %** | **99,27 %** |
|  | * 1. **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **43.216.000,-** | **43.206.000,-** | | **99.98%** | **100%** | **100%** | **100%** | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kunerja Perangkat Daerah |
|  | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 13.026.000,- | 13.026.000,- | | 100% | 3 Dok | 3 Dok | 100% | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen Renstra, Renja Pokok/Perubahan |
|  | 1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.850.000,- | 5.850.000,- | | 100% | 1 Dok | 1 Dok | 100% | Tersedianya Dokumen RKA SKPD |
|  | 1. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD | 5.000.000,- | 5.000.000,- | | 100% | 1 Dok | 1 Dok | 100% | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD |
|  | 1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5.000.000,- | 5.000.000,- | | 100% | 1 Dok | 1 Dok | 100% | Tersedianya Dokumen DPA SKPD |
|  | 1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5.000.000,- | 5.000.000,- | | 100% | 1 Dok | 1 Dok | 100% | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA SKPD |
|  | 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | 4.340.000,- | 4.330.000,- | | 99,77% | 3 Lap | 3 Lap | 100% | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD ( Laporan LAKIP, LPPD dan LKPJ) |
|  | e. Evaluasi Kinerja Perangkat  Daerah | 5.000.000 | 5.000.000 | | 100% | 3 Lap | 3 Lap | 100% | Tersedianya Laporan SKM, Laporan Rencana Aksi dan Laporan Evaluasi Renja |
|  | * 1. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.435.222.000,-** | **2.320.246.500,-** | | **95,30%** | **100%** | **100%** | **100%** | **Tersedianya Laporan Keuangan yang disusun secara tepat akurat dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah** |
|  | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.335.775.000,- | 2.273.891.000,- | | 97,35% | 12 Lap | 12 Lap | 100% | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN |
|  | 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 6.000.000 | 6.000.000 | | 100 | 12 Lap | 12 Lap | 100% | Terlaksanannya Pengujian/Verifikasi Keunagan SKPD |
|  | 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 6.351.000,- | 6.351.000,- | | 100% | 1 Lap | 1 Lap | 100% | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun |
|  | 1. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 6.000.000 | 5.997.000 | | 99,95% | 2 Lap | 2 Lap | 100% | Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksa |
|  | 1. Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 6.000.000,- | 6.000.000,- | | 100% | 12 Lap. | 12 Lap. | 100% | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi |
|  | 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan /triwulan/ Semesteran SKPD | 13.874.000,- | 13.874.000,- | | 100% | 12 Lap | 12 Lap | 100% | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
|  | **3. Administrasi Umum**  **Perangkat Daerah** | **362.250.000,-** | **361.292.762,-** | | **99,74%** | **100%** | **100%** | **100%** | **Tersedianya pemenuhan administrasi kepegawaian ASN** |
|  | * 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 4.000.000,- | 4.000.000,- | | 100% | 5 Lap | 5 Lap | 100% | Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor |
|  | * 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 142.350.000,- | 141.571.250,- | | 99,45% | 5 Lap | 5 Lap | 100% | Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor |
|  | * 1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.700.000,- | 10.700.000,- | | 100% | 12 Lap | 12 lap | 100% | Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan |
|  | * 1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 5.200.000,- | 5.200.000,- | | 100% | 5 Lap | 5 Lap | 100% | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |
|  | * 1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200.000.000,- | 199.821.512,- | | 99,91% | 12 Lap | 12 lap. | 100% | Terlaksananya penyelenggaraan rapat konsultasi dan koordinasi SKPD |
|  | **4.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **10.000.000** | **9.990.000** | | **99,90%** | **100 %** | **100 %** | **100%** | **Tersedianya pemenuhan administrasi kepegawaian ASN** |
|  | a. Pendataan dan Pengolahan  Administrasi Kepegawaian | 5.000.000 | 4.990.000 | | 99.80% | 12 lap | 12 lap | 100% | Tersedianya dan tersusunnya laporan administrasi pegawai |
|  | b. Monitoring, Evaluasi dan  Penilaian Kinerja Pegawai | 5.000.000 | 5.000.000 | | 100% | 1 Dok | 1 Dok | 100% | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai |
|  | * + - 1. **Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah** | **5.000.000** | **5.000.000** | | **100%** | **100 %** | **100 %** | **100 %** | **Tersedianya Laporan administrasi barang milik daerah sebagai penunjang pelayanan** |
|  | a. Rekonsiliasi dan  Penyusunan Laporan  barang Milik daerah pada  SKPD | 5.000.000 | 5.000.000 | | 100% | 4 Lap | 4 Lap | 100 % | **Tersedianya laporan barang milik daerah** |
|  | * + - 1. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **44.000.000,-** | **43.944.000,-** | | **99.87%** | **100%** | **100%** | **100%** | **Tersedianya Pemenuhan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Pendukung Kinerja** |
|  | 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 44.000.000,- | 43.944.000,- | | 99.87% | 2 unit | 2 unit | 100% | Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan kantor |
|  | **7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **288.737.000,-** | **280.388.581,-** | | **97,11%** | **100%** | **100%** | **100%** | **Tersedianya Jasa Penunjang Perkantoran** |
|  | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 23.068.000,- | 23.068.000,- | | 100% | 12 Lap | 12 Lap | 100% | Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat |
|  | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 81.550.000,- | 74.405.581,- | | 91,24% | 36 Lap | 36 Lap | 100% | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |
|  | **c.** Penyediaan Jasa Umum  Pelayanan Kantor | 184.119.000 | 182.915.000 | | 99,35% | 12 Lap | 12 Lap | 100 % | Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan umum kantor |
|  | **8.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **133.560.000,-** | **133.536.249,-** | | **99,98%** | **100%** | **100%** | **100%** | **Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah** |
|  | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 18.200.000,- | 18.200.000,- | | 100% | 5 Lap | 5 Lap | 99,91% | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
|  | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 77.260.000- | 77.236.249,- | | 99,97% | 2 unit | 2 unit | 99,89% | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan |
|  | 1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | 7.270.000,- | 7.270.000,- | | 100% | 11 unit | 11 unit | 100% | Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya |
|  | d. Pemeliharaan/Rehabilitasi  Gedung Kantor dan  Bangunan Lainnya | 30.830.000 | 30.830.000 | | 100% | 1 Unit | 1 Unit | 100 % | Terlaksananya perbaikan Gedung kantor |
| **II.** | **Program Pendaftaran Penduduk** | **194.562.000**,- | **194.536.850,-** | | **99,99%** | **Penerbitan KTP-el = 97%** | **Penerbitan KTP-el = 92,77 %** | **Penerbitan KTP-el=95,64 %** | **Meningkatnya Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk** |
| **Penerbitan KIA = 35%** | **Penerbitan KIA = 54,08%** | **Penerbitan KIA=**  **154,51%** |
|  | **1. Penataan Pendaftaran**  **Penduduk** | **44.562.000,-** | **44.562.000,-** | | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk** |
| a. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk | 44.562.000 | 44,562.000 | | 100 % | 1 Lap | 1 Lap | 100 % | Tersedianya dokumen kependudukan selain blanko KTP-El, formular dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebututhan |
|  | **3. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | **150.000.000**,- | **149.974.850** | | **99,98%** | **100%** | **100%** | **100%** | **Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** |
| 1. Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | 150.000.000,- | 149.974.850 | | 99,98% | 1 Lap | 1 Lap | 100% | Penerbitan Dokumen Kependudukan |
| **III.** | **Program Pencatatan Sipil** | **41.640.000,-** | **41.625.000,-** | | **99,96%** | **94 %** | **94 %** | **86,96 %** | **Meningkatnya Penerbitan Dokumen pencatatan Sipil** |
|  | **1. Pelayanan Pencatatan Sipil** | 41.640.000,- | 41.625.000,- | | 99,96% | **100%** | **100%** | **100%** | **Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil** |
| 1. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil | 41.640.000,- | 41.625.000,- | | 99,96% | 1 Lap | 1 Lap | 100 % | Penerbitan Akta Pencatatan Sipil |
| **IV.** | **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **67.630.000,--** | **67.440.724,-** | | **99,72%** | **76,92%** | **61,54%** | **80,01%** | **Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan** |
|  | **1. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **12.000.000,-**- | **11.884.000,-** | | **99,03%** | **100%** | **100%** | **100%** | **Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** |
| a. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk | 12.000.000,- | 11.884.000,- | | 99,03% | 2 Lap | 2 Lap | 100% | Tersedianya laporan Agregat Kependudukan |
|  | **2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **55.630.000**,- | **55.556.724,-** | | **99,87%** | **100%** | **80,77%** | **80,77%** | **Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** |
| 1. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 38.000.000,- | 37.983.524,- | | 99,96% | 12 lap | 12 lap | 100% | Tersedianya Laporan Penggunaan Aplikasi SIAK pada pelayanan Dokumen kependudukan |
|  | 1. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 17.630.000 | 17.573.200 | | 99,68% | 26 PKS | 16 PKS | 61,54% | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan |
| **V** | **Program Pengelolaan Profil Kependudukan** | **24.000.000** | **24.000.000** | **100%** | | **100 %** | **100 %** | **100 %** | **Tersedianya persentase pemenuhan data profil kependudukan** | |
|  | **1. Penyusunan Profil**  **Kependudukan** | **24.000.000** | **24.000.000** | **100%** | | **100 %** | **100 %** | **100 %** | **Tersedianya dan tersusunnya data profil kependudukan** | |
| a. Penyediaan Data  Kependudukan  Kabupaten/Kota | **24.000.000** | **24.000.000** | **100%** | | 1 Dok | 1 Dok | 100 % | Tersedianya data kependudukan kabupaten/kota | |
| **JUMLAH** | | **3.550.370.000,-** | **3.478.851.335,-** | **97.99%** | | **100%** | **99,82%** | **99,82%** |  | |

**Sumber : Laporan RFK Disdukpencapil Tahun 2023**

Dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan terdapat beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

* + 1. Dukungan Dana belum memadai untuk pelaksanaan pelayanan.
    2. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM.
    3. Dukungan dana yang belum memadai untuk pelatihan bagi SDM
    4. Perbandingan jumlah pegawai dengan beban kerja tidak seimbang.
    5. Jenis pelayanan tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang dilayani.
    6. Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana.
    7. Tidak tersedianya pembiayaan/penganggaran pelayanan keliling di Kecamatan Daratan maupun Kepulauan dalam rangka pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan
    8. Sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak memadai.
    9. Keterbatasan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana baik sarana dan prasarana pendukung maupun sarana pelayanan.
    10. Adanya penambahan persyaratan berupa sertifikat ISO dari Kementrian Dalam Negeri bagi OPD yang akan melakukan kerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan sementara belum ada OPD di Kabupaten Kepulauan yang memiliki Sertifikat ISO.
    11. SIAK terdistribusi yang beralih menjadi SIAK terpusat sehingga pengolahan data untuk kepentingan pelaporan menjadi terhambat.

Untuk lebih meningkatkan capaian kinerja kegiatan sebagai perdukung peningkatan capaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut diatas, maka upaya/solusi untuk mengatasi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Perlu penambahan anggaran baik untuk pengadaan sarana dan prasarana maupun untuk pelaksanaan pelayanan keliling di Kecamatan daratan maupun di Kecamatan Kepulauan

Pelatihan bagi pegawai/SDM pelayanan adminduk.

2. Peningkatan pelayanan keliling administrasi kependudukan ke desa-desa terpencil sehingga dapat memenuhi pencapaian target RPJMD manupun target nasional.

3. Perlu adanya perekrutan pegawai untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan

percepatan penerbitan dokumen kependudukan.

5. Perlu diadakan pelatihan bagi SDM Pelayanan Adminduk.

6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung maupun Sarana dan Prasarana Pelayanan.

**BAB IV**

**PENUTUP**

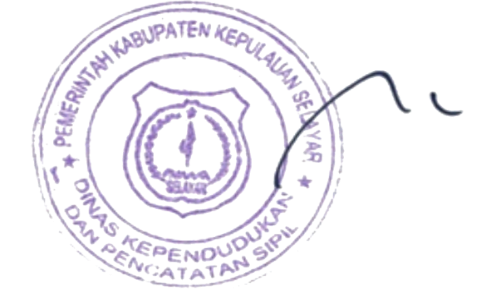
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT, akhirnya dengan izinnya Laporan Kinerja Inatansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Pemerintah dan format laporan disusun sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami harap laporan ini dapat bermamfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan dan menjadi tolak ukur dan perbandingan sampai sejauh mana keberhasilan kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra Tahun 2021 – 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023, semoga segala upaya baik selalu dan mendapat ridha dan perlindungan dari Allah SWT, Amin.

Benteng, 30 Januari 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN**

**DAN PENCATATAN SIPIL,**

**Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL, M.M**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670905 199811 1 003